

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Organisasi merupakan wadah yang menyatukan perbedaan yang kompleks dalam mencapai visi dan misi bersama anggota- anggota dalam suatu organisasi. Dengan adanya organisasi, semua orang akan bisa ikut andil dalam meluangkan pendapatnya, bahkan membantu mewujudkan cita-cita bangsa dan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Organisasi mengumpulkan serangkaian aktivitas manusia yang dipersatukan oleh tujuan yang sama. Semua aktivitas dalam organisasi sudah terorganisir sebelum organisasi itu berdiri. Hal penting dalam sebuah organisasi adalah struktur organisasi, semua aktivitas akan terstruktur dengan baik ketika pembagian tugas dalam organisasi jelas. Sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih tugas yang disebabkan oleh miss komunikasi.

Secara garis besar, dalam organisasi terdiri dari unsur-unsur yang fundamental yaitu manusia, tempat kedudukan, tujuan, dan aktivitas. Unsur-unsur tersebut yang membuat organisasi berdiri. Manusia sebagai penghuni organisasi yang akan menggerakkan organisasi sesuai dengan kinerja yang telah direncanakan. Tempat kedudukan juga membuat manusia merasa bertanggung jawab karena telah diamanahi untuk menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai dengan kedudukannya.

Semua aktivitas yang dilakukan dalam organisasi memiliki visi yaitu untuk mencapai tujuan organisasi.

Organisasi terdiri dari dua jenis yaitu organisasi publik dan organisasi swasta. Perbedaannya adalah bahwa organisasi publik berorientasi untuk melayani publik dan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah, sedangkan organisasi swasta berorientasi pada profit, dan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta atau perorangan. Di Indonesia banyak sekali organisasi, baik itu organisasi publik ataupun organisasi swasta. Adapun yang termasuk dalam organisasi publik salah satunya yaitu instansi pemerintah. Organisasi publik yang diketahui tugasnya berorientasi kepada pelayanan yang harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan prima. Masyarakat menjadi sasaran utama dalam organisasi publik yang akan menyelesaikan urusan-urusannya kepada pihak pelayanan atau lebih difokuskan oleh peneliti yaitu instansi pemerintahan.

Instansi pemerintahan di Indonesia didirikan untuk menyelesaikan tugas-tugas negara, baik itu tingkat terkecil yaitu desa atau kelurahan, sampai tingkat nasional, semuanya memiliki tujuan yang sama yaitu menyelesaikan tugas-tugas negara. Instansi pemerintah bekerja berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undangan, dan aturan-aturan lainnya.

Tantangan yang dihadapi oleh instansi pemerintah pun semakin besar seiring dengan berkembangnya zaman, perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat instansi pemerintah harus responsif dalam mengelola urusan-urusannya,

bahkan harus bisa mengelola perkembangan zaman dengan baik sebagai media untuk meningkatkan kinerjanya.

Sebuah instansi pemerintah pasti memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Kumpulan aktivitas didalamnya yang menghasilkan tujuan dan strategi terstruktur merupakan sebuah kinerja yang menjadi inti dalam meningkatkan produktivitas organisasi. Terutama organisasi pemerintah dengan membawa tujuan utama menjalankan tugas negara dan memberikan pelayanan publik yang baik. Organisasi pemerintah atau biasa disebut instansi pemerintah mengakselerasi kinerjanya agar menjadi instansi pemerintah yang diharapkan oleh masyarakat, dan sudah menjadi tugas instansi pemerintah untuk menjadi pelayan bagi masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan urusan-urusannya sesuai dengan masing-masing sektor instansinya. Instansi pemerintah pasti menghadapi permasalahan-permasalahan yang harus selalu dievaluasi. Agar kinerjanya terus meningkat ke arah yang lebih baik.

Diketahui bahwa kinerja merupakan indikator sukses atau tidaknya sebuah instansi pemerintah, kinerja instansi pemerintah yang diukur berdasarkan produktivitas dan kualitas, itulah yang dimaksud kinerja.

Membahas tentang kinerja instansi pemerintah di Indonesia selalu identik dengan permasalahan-permasalahan yang sudah umum diketahui dan dirasakan oleh masyarakat, seperti dalam hal pelayanan yang lama dan berbelit-belit, terjadinya pungutan liar, korupsi, kolusi dan nepotisme yang merajalela. Permasalahan tersebut menonjol pada instansi pemerintah karena tujuan utama

instansi pemerintah untuk memberikan pelayanan publik. Kinerja instansi pemerintah yang diharapkan oleh masyarakat yaitu dapat menjadi penyedia kebutuhan masyarakat yang efektif dan efisien, mungkin dengan permasalahan-permasalahan tersebut bisa menurunkan kinerja instansi pemerintah yang diharapkan. Akhirnya menghambat pencapaian visi dan misi instansi pemerintah tersebut. Maka dari itu, pemerintah menerbitkan peraturan yang berupa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tanggal 21 April 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Informasi tentang kinerja instansi pemerintah harusnya lebih jujur dan mudah untuk diakses, supaya dalam instansi pemerintah selalu ada evaluasi untuk terus meningkatkan kinerjanya. Penggunaan sistem LAKIP pun masih kurang efektif karena beberapa permasalahan seperti susahnya LAKIP untuk diakses, dan kurang lengkapnya LAKIP dalam menjelaskan tentang kinerja instansi pemerintah.

Berbicara mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh instansi pemerintah, maka peneliti memilih salah satu instansi pemerintah yang ada di Kota Bandung yaitu Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung untuk melakukan penelitian.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung merupakan salah satu instansi pemerintah yang terletak di Jalan Kawalayaan Nomor 2 Kota Bandung. Penulis melakukan penelitian berdasarkan Peraturan Walikota Kota Bandung yaitu Nomor 1394 Tahun 2016 yang menjelaskan mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung. Dinas tersebut merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang mengelola urusan pemerintahan pada bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Koperasi ini bertugas untuk membantu masyarakat dalam bidang usahanya, meningkatkan usaha masyarakat baik itu usaha mikro, kecil dan menengah. Bekerjasama dengan masyarakat berdasarkan prosedur yang berlaku. Pelayanan pun harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima, karena indikator keberhasilan kinerja dinas salah satunya yaitu indeks kepuasan masyarakat.

Fenomena-fenomena yang ditemukan pada saat penulis melakukan penelitian awal yaitu ketika mengikuti kegiatan praktik kerja lapangan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung, secara umum kinerjanya sudah baik. Namun ada beberapa masalah yang menurut penulis harus segera diatasi agar kinerja organisasinya lebih meningkat lagi yaitu seperti masalah masih rendahnya partisipasi anggota terhadap pengembangan usaha Koperasi dan UMKM, masih kurangnya kuantitas pegawai, masih rumitnya pelayanan yang diberikan, dan masih ada beberapa target kerja pada indikator kinerja utama Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung yang belum ter-realisis sepenuhnya atau seratus persen (%). Seperti data pada bidang Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Koperasi dan UKM sebagai berikut :

Tabel 1.1

**Realisasi dalam Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung Tahun
2016-2018**

Indikator	Tahun					
	2016		2017		2018	
Jumlah Wirausaha Baru	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	13.776 orang	3.129 orang	1.000 orang	1.000 orang	600 orang (setahun)	200 orang
Jumlah Lapangan Kerja Baru Per Koperasi	980 orang		730 orang		250 orang	

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung Tahun 2018

Dari Tabel 1.1 dapat kita simpulkan sebagai berikut :

Jumlah wirausaha baru dan jumlah lapangan kerja baru perkoperasian merupakan indikator kinerja utama dalam mencapai sasaran meningkatnya kualitas usaha mikro, kecil dan menengah yang berdaya saing. Berdasarkan tabel di atas dapat kita simpulkan sebagai berikut:

1. Dari tahun 2016 sampai tahun 2018 adanya penurunan jumlah target pada kedua indikator kinerja Dinas Koperasi dan UMKM kota Bandung di atas. Dan pencapaian target untuk indikator wirausaha baru masih ada yang belum seratus persen, adapun kendala-kendalanya yaitu Ketersediaan alokasi anggaran untuk program WUB, Minat masyarakat untuk mengikuti program WUB relatif kurang, dan juga realisasi yang disesuaikan dengan jumlah anggaran yang masih kurang.

2. Tahun 2017 indikator jumlah lapangan kerja baru per koperasi berjumlah 730 orang sedangkan tahun 2016 Jumlah lapangan kerja baru per koperasi berjumlah 980 orang. Adanya penurunan jumlah lapangan kerja baru per koperasi dari tahun 2016 ke 2017 karena pada tahun 2016 indikator jumlah lapangan kerja baru perkoperasi masih bersatu dengan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan di Kota Bandung.
3. Penurunan jumlah untuk indikator jumlah lapangan kerja baru per koperasi dari tahun 2016 s.d tahun 2017 sebanyak 250 orang atau 25,51%.
4. Tahun 2018 Triwulan II realisasi untuk indikator jumlah lapangan kerja baru per koperasi sebanyak 250 orang.
5. Peserta yang telah melakukan diklat terbentur oleh investasi modal/kurang modal untuk dapat mengembangkan usahanya.
6. Peserta tidak bisa memaksimalkan fasilitas pembiayaan yang dilakukan oleh dinas untuk mengembangkan usahanya, mereka lebih mengharapkan dinas memberikan suntikan modal secara langsung.
7. Keterbatasan kemampuan pengelola koperasi dalam membuka/mengembangkan unit usaha baru.

Permasalahan tersebut harus menjadi sorotan utama kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung untuk dikoordinasikan dengan kepala bidang-bidangnya kemudian dilakukan evaluasi kinerja dalam rangka meningkatkan indikator-indikator kinerja yang masih kurang mencapai target.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik dan akan melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung Tahun 2016-2018”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah pada penelitian ini yaitu :

Masih ada beberapa target kerja pada indikator kinerja utama Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung yang belum ter-realisis sepenuhnya atau seratus persen (%).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian serta penjelasan yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

“Bagaimana Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung tahun 2016-2018?”.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan sasaran penulis dalam melakukan penelitian ini yang ingin dicapai adalah untuk menganalisis dan mengetahui kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung tahun 2016-2018.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan pihak Dinas Koperasi dan UMKM kota Bandung, dan umumnya bagi para pembaca. Adapun kegunaannya dibagi kedalam dua bagian yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap perkembangan khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang keilmuan Administrasi Publik, dalam mengetahui kinerja organisasi pada instansi pemerintah khususnya Dinas Koperasi dan UMKM kota Bandung. Selain itu dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi yang membutuhkan dan memberikan ide dan inspirasi bagi rekan-rekan yang akan mengadakan penelitian di bidang yang sama di masa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

Adapun manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam kebijakan, khususnya kepada Dinas Koperasi dan UMKM kota Bandung guna meningkatkan kinerja organisasinya. Selain itu diharapkan juga penelitian ini dapat mempererat hubungan antara peneliti dengan semua pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini.

F. Kerangka Pemikiran

Dwiyanto mengemukakan ada lima indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi pemerintah yaitu :

1) Produktivitas

Dalam dimensi produktivitas yang diketahui diambil dari bahasa Inggris yaitu dari kata *productivity* yang artinya efektivitas hasil pada suatu organisasi

pemerintah. Indikator produktivitas juga mengukur efektivitas pelayanan, rasio antara input dengan output. Jadi yang menjadi patokan dalam pengukuran indikator produktivitas ini yaitu efektivitas pelayanan publik yang dilakukan oleh suatu organisasi pemerintah dapat memberikan hasil yang diharapkan oleh berbagai pihak.

2) Kualitas Layanan

Yang kedua yaitu kualitas layanan, indikator ini merupakan indikator yang paling menjadi sorotan untuk mengukur kinerja organisasi pemerintah, karena kinerja organisasi pemerintah dinilai langsung oleh masyarakat berdasarkan indeks kepuasan masyarakat.

Kualitas layanan yang dilakukan oleh suatu organisasi pemerintah dapat dengan mudah diketahui berdasarkan indeks kepuasan masyarakat yang diukur menggunakan metode tertentu, dan indeks kepuasan masyarakat juga sangat mudah untuk didapat dengan adanya media massa.

3) Responsivitas

Proses organisasi publik atau organisasi pemerintah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yaitu ada proses input, kemudian diproses, setelah diproses akan ada output, dan dari hasil output tersebut ada feedback untuk organisasi pemerintah. Dalam proses inilah akan diketahui bagaimana responsivitas organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, kemudian menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Maka dari itu, jelas sekali apabila ada organisasi pemerintah yang tidak selaras dengan masyarakat menunjukkan bahwa responsivitas organisasi tersebut rendah dan otomatis kinerjanya pun jelek.

4) Responsibilitas

Responsibilitas juga menjadi tolak ukur kinerja organisasi publik, dalam organisasi ada sebuah aturan atau kebijakan tertentu untuk mengatur organisasi tersebut. Agar kinerja organisasi baik dan sistematis.

Indikator ini menjadi alat ukur untuk suatu organisasi pemerintah apakah pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam organisasi itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan organisasi yang baik dan benar. Dan sejauh mana organisasi tersebut dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya.

5) Akuntabilitas

Akuntabilitas organisasi pemerintah menunjukkan pada tingkat kepatuhan organisasi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan dan kegiatan-kegiatan organisasinya kepada pimpinan. Karena para pimpinan yang memimpin dinas-dinas tersebut dipilih oleh rakyat, dan seharusnya selalu merepresentasikan dan mendahulukan kepentingan rakyatnya sendiri.

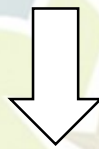
Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik konsisten dengan kehendak masyarakat. Organisasi pemerintah atau organisasi publik berkewajiban untuk selalu melaporkan hasil kinerjanya setiap jangka waktu tertentu dengan menggunakan alat laporan yang berupa LKIP. Suatu kegiatan organisasi publik

memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Berikut penulis susun kerangka pemikiran pada gambar di bawah ini :

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

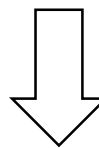
Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung



Pengukuran kinerja organisasi pemerintah

Dwiyanto (Sembiring, 2012:98-99) :

1. Produktivitas
2. Kualitas Layanan
3. Responsivitas
4. Responsibilitas
5. Akuntabilitas



Hasil kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung

G. Proposisi

Berdasarkan kerangka pemikiran dan dimensi pengukuran kinerja organisasi pemerintah di atas maka proposisi penelitian ini adalah sebagai berikut :

Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung akan baik dan efektif jika sesuai dengan produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.

